

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : SP DIPA- 013.08.2.409215/2020**

Revisi ke 01
Tanggal : 16 Juli 2020

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 20 Tahun 2019 tentang APBN TA 2020

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- | | | |
|-------------------------------|------------|---|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga | : (013) | KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI |
| 2. Unit Organisasi | : (08) | DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN |
| 3. Provinsi | : (18) | SULAWESI TENGAH |
| 4. Kode>Nama Satker | : (409215) | KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALU |
| Sebesar | : Rp. | 123.200.000 (SERATUS DUA PULUH TIGA JUTA DUA RATUS RIBU RUPIAH) |

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

013.08.06 Program Pembentukan Hukum
013.08.06.5250 Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Hukum di Wilayah

	Jumlah Uang
Rp.	123.200.000
Rp.	123.200.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|-------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 123.200.000 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNBP | | | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| PNBP TA Berjalan | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| | | | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- | | | |
|-----------------|-----------|-------------|
| 1. KPPN P A L U | (051) Rp. | 123.200.000 |
|-----------------|-----------|-------------|

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

Jakarta, 12 November 2019
A.N MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ASKOLANI
NIP. 196606111992021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA- 013.08.2.409215/2020
IA. INFORMASI KINERJA**



DS:6650-7063-8606-0175

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (08) DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Provinsi : (18) SULAWESI TENGAH
Kode>Nama Satker : (409215) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALU

Kuasa Pengguna Anggaran : LILIK SUJANDI, Bc.IP., S.I.P., M.Si.
Bendahara Pengeluaran : MUHAMMAD IDHAM SUTOPO
Pejabat Penanda Tangan SPM : BURHAZIR ZAMDA R., S.H.

Halaman : IA.1

1 Fungsi	03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN			123.200.000
Sub Fungsi	03.03	PEMBINAAN HUKUM			123.200.000
2 Program	013.08.06	Program Pembentukan Hukum			123.200.000
Sasaran Program	01	Terbentuknya peraturan-perundang-undangan yang berkualitas			
Indikator Kinerja Program	01	Persentase (%) rancangan peraturan perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan perencanaan	80	%	
	02	Jumlah tenaga perancang peraturan perundang-undangan yang mendapatkan pembinaan	200	orang	
	03	Persentase (%) harmonisasi peraturan perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan permohonan	80	%	
Output Program	01	Rancangan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Output Program	01	Persentase (%) rancangan peraturan perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan perencanaan	80	%	
	02	Jumlah tenaga perancang peraturan perundang-undangan yang mendapatkan pembinaan	200	orang	
	03	Persentase (%) harmonisasi peraturan perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan permohonan	80	%	
Kegiatan	5250	Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Hukum di Wilayah			123.200.000
Sasaran Kegiatan	01	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah			
	02	Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan			
Output Kegiatan	5250.001	Fasilitasi pembentukan produk hukum daerah	12 Raperda		119.500.000
Indikator Output Kegiatan	01	jumlah rancangan peraturan daerah yang terfasilitasi	719	PUU	
Output Kegiatan	5250.002	Pembinaan perancang peraturan perundang-undangan di daerah	20 Orang		3.700.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah perancang peraturan perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan	602	Orang	

Jakarta, 12 November 2019
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

ttd.
Prof. Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.
NIP 197105011993031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR : DIPA- 013.08.2.409215/2020

I B. SUMBER DANA



DS:6650-7063-8606-0175

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 Unit Organisasi : (08) DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
 Provinsi : (18) SULAWESI TENGAH
 Kode>Nama Satker : (409215) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALU

Halaman : I B. 1

					Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2020	Rp.	123.200.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	123.200.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA- 013.08.2.409215/2020
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:6650-7063-8606-0175

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (08) DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Provinsi : (18) SULAWESI TENGAH
Kode>Nama Satker : (409215) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALU
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
409215	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALU	-	123.200	-	-	-	123.200		
013.08.06	Program Pembentukan Hukum	-	123.200	-	-	-	123.200		
5250	Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Hukum di Wilayah	-	123.200	-	-	-	123.200		
5250.001	Fasilitasi pembentukan produk hukum daerah	-	119.500	-	-	-	119.500	18.51	
01	RM	-	119.500	-	-	-	119.500	051	
5250.002	Pembinaan perancang peraturan perundang-undangan di daerah	-	3.700	-	-	-	3.700	18.51	
01	RM	-	3.700	-	-	-	3.700	051	
JUMLAH		-	123.200	-	-	-	123.200		

Jakarta, 12 November 2019
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

ttd.
Prof. Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.
NIP 197105011993031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA- 013.08.2.409215/2020
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:6650-7063-8606-0175

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (08) DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Provinsi : (18) SULAWESI TENGAH
Kode>Nama Satker : (409215) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALU

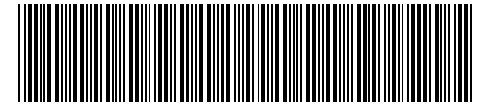
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	409215	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALU													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	0	16.884	0	0	6.600	7.600	19.046	15.346	15.346	27.032	15.346	123.200
		52 BELANJA BARANG	0	0	16.884	0	0	6.600	7.600	19.046	15.346	15.346	27.032	15.346	123.200
013.08.06.5250		Penyelenggaraan Fasilitas Pembentukan Hukum di Wilayah	0	0	16.884	0	0	6.600	7.600	19.046	15.346	15.346	27.032	15.346	123.200
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	0	16.884	0	0	6.600	7.600	19.046	15.346	15.346	27.032	15.346	123.200

Jakarta, 12 November 2019
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

ttd.
Prof. Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.
NIP 197105011993031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA- 013.08.2.409215/2020
IV A. B L O K I R**



DS:6650-7063-8606-0175

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [08] DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Provinsi : [18] SULAWESI TENGAH
Kode dan Nama Satker : [409215] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALU

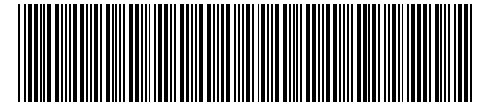
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 12 November 2019
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

ttd.
Prof. Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.
NIP 197105011993031001

**DAFTAR ISI AN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA- 013.08.2.409215/2020
IV B. C A T A T A N**



DS:6650-7063-8606-0175

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [08] DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Provinsi : [18] SULAWESI TENGAH
Kode dan Nama Satker : [409215] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALU

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 12 November 2019
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

ttd.
Prof. Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.
NIP 197105011993031001